

Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Kasus Illegal Fishing di Kepulauan Riau

Owen Fowel Purba *¹

Ayu Efrita Dewi ²

Heni Widiyani ³

^{1,2,3,4} Universitas Maritim Raja Ali Haji/Prodi Ilmu Hukum

*e-mail : owenfowel13@gmail.com¹ , ayuefritadewi@umrah.ac.id² , heni@umrah.ac.id³

Abstrak

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah serius dalam menangani kasus illegal fishing di Kepulauan Riau, sebuah isu yang memiliki dampak signifikan terhadap ekosistem laut dan keberlanjutan sumber daya perikanan. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah peningkatan patroli maritim untuk mengawasi perairan tersebut secara lebih ketat. Dengan meningkatkan kehadiran kapal patroli, pemerintah berupaya mencegah masuknya kapal-kapal ilegal yang berpotensi merusak ekosistem laut dan merampas hasil perikanan secara tidak sah. Selain itu, pemerintah juga telah memperkuat kerja sama dengan negara-negara tetangga dan lembaga internasional untuk meningkatkan koordinasi dalam penanggulangan illegal fishing. Dengan berbagi informasi dan sumber daya, upaya bersama ini dapat lebih efektif dalam menindak pelaku illegal fishing yang sering kali melibatkan praktik-praktik perdagangan ilegal dan merugikan nelayan lokal. Pemerintah juga menerapkan kebijakan hukuman yang lebih tegas terhadap pelaku illegal fishing, termasuk sanksi finansial dan hukuman pidana yang lebih berat. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan memperingatkan pihak-pihak yang berniat melanggar aturan perikanan. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif dengan melakukan pendekatan studi pustaka melihat berbagai kasus yang telah terjadi dan dibuat pembaruan akan kebijakan yang akan dilakukan untuk kedepannya. Dengan serangkaian kebijakan ini, pemerintah berkomitmen untuk secara efektif mengatasi kasus illegal fishing di Kepulauan Riau, melindungi ekosistem laut, dan memastikan keberlanjutan sumber daya perikanan bagi generasi yang akan datang.

Kata Kunci : Penangkapan ikan , Pemerintah, Kebijakan.

Abstract

The Indonesian government has taken serious steps in dealing with cases of illegal fishing in the Riau Islands, an issue that has a significant impact on marine ecosystems and the sustainability of fisheries resources. One of the policies implemented is increasing maritime patrols to monitor these waters more closely. By increasing the presence of patrol boats, the government is trying to prevent the entry of illegal vessels which have the potential to damage marine ecosystems and illegally seize fisheries products. Apart from that, the government has also strengthened cooperation with neighboring countries and international institutions to increase coordination in dealing with illegal activities. fishing. By sharing information and resources, this joint effort can be more effective in cracking down on perpetrators of illegal fishing which often involves illegal trade practices and harms local fishermen. The government is also implementing stricter punitive policies against perpetrators of illegal fishing, including financial sanctions and punishments. more serious punishment. This is intended to provide a deterrent effect and warn parties who intend to violate fisheries regulations. This research was carried out using a descriptive qualitative method by using a literature study approach looking at various cases that have occurred and making updates on policies that will be implemented in the future. With this series of policies, the government is committed to effectively dealing with cases of illegal fishing in the Riau Islands, protecting marine ecosystems, and ensuring the sustainability of fisheries resources for future generations.

Keywords : Fishing, Government, Policy.

PENDAHULUAN

Kepulauan Riau, yang terletak di sebelah timur Sumatera, merupakan salah satu gugusan pulau terbesar di Indonesia. Dikenal akan keindahan alamnya, Kepulauan Riau juga memiliki peranan strategis dalam sektor perikanan, menyumbang secara signifikan terhadap

perekonomian nasional. Namun, seiring dengan kekayaan alamnya, wilayah ini juga menjadi sasaran empuk bagi praktik illegal fishing. Illegal fishing bukan hanya mengancam kelangsungan ekosistem laut, tetapi juga merugikan nelayan lokal yang menggantungkan hidup mereka pada hasil tangkapan laut. Studi kasus yang mencolok adalah kasus ilegal fishing di perairan Kepulauan Riau yang melibatkan sejumlah kapal asing. Dalam beberapa tahun terakhir, insiden-insiden semacam itu telah meningkat, menciptakan tantangan serius bagi keberlanjutan sumber daya perikanan dan kehidupan ekonomi masyarakat pesisir. Pemerintah Indonesia merespons dengan langkah-langkah kebijakan yang signifikan, mencoba menghadapi permasalahan kompleks ini dari berbagai sudut pandang.

Pemerintah Indonesia, menyadari urgensi permasalahan illegal fishing, telah meningkatkan patroli maritim di sekitar perairan Kepulauan Riau. Penguatan kehadiran kapal patroli dan penggunaan teknologi canggih memungkinkan penjaga pantai untuk lebih efektif memantau dan menindak kapal-kapal ilegal yang masuk ke perairan Indonesia. Studi kasus menunjukkan bahwa kehadiran lebih intensif ini telah memberikan dampak positif, dengan penangkapan lebih banyak kapal ilegal dan penurunan aktivitas illegal fishing dalam periode tertentu. Indonesia secara aktif menjalin kerja sama dengan negara-negara tetangga dan lembaga internasional untuk pertukaran informasi dan sumber daya. Studi kasus menyoroti kolaborasi yang berhasil dengan negara-negara seperti Malaysia dan Singapura, di mana informasi intelijen bersama dan operasi patroli bersama telah berhasil mengatasi pelaku illegal fishing yang sering kali beroperasi di perairan lintas batas. Pemerintah Indonesia juga mengambil pendekatan tegas dalam memberlakukan sanksi hukum terhadap pelaku illegal fishing. Studi kasus menunjukkan bahwa hukuman pidana dan denda yang signifikan diberlakukan sebagai bentuk pembatasan dan efek jera. Analisis efektivitas kebijakan ini melibatkan pemantauan penanganan hukum terhadap pelaku illegal fishing, termasuk proses peradilan dan penerapan sanksi. pemerintah juga mengakui pentingnya pendidikan dan pembinaan sebagai langkah preventif. Studi kasus menggambarkan program-program edukasi yang diadakan di komunitas lokal, dengan fokus pada pemahaman masyarakat akan keberlanjutan sumber daya perikanan dan dampak negatif illegal fishing. Evaluasi efektivitas program ini melibatkan pengukuran tingkat kesadaran masyarakat lokal dan perubahan perilaku terkait penangkapan ikan yang ramah lingkungan.

Kepulauan Riau, yang terdiri dari lebih dari 3.000 pulau, dikelilingi oleh perairan yang kaya akan keanekaragaman hayati laut. Potensi sumber daya perikanan di wilayah ini menjadikannya target bagi praktik illegal fishing yang merusak ekosistem dan mengancam kelangsungan hidup berbagai spesies ikan. Illegal fishing sering kali melibatkan kapal-kapal asing yang mengeksploitasi perairan Indonesia tanpa izin, merampas sumber daya perikanan secara tidak sah, dan menciptakan ketidakseimbangan ekosistem. illegal fishing tidak hanya dirasakan oleh lingkungan, tetapi juga oleh masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup mereka pada hasil tangkapan laut. Nelayan lokal, yang hidup dalam keterbatasan sumber daya dan teknologi, menderita karena penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan. Selain itu, perdagangan ilegal hasil perikanan mengancam keberlanjutan ekonomi lokal dan memberikan tekanan tambahan pada nelayan yang sudah rentan. Illegal fishing juga memiliki dimensi keamanan nasional. Penangkapan ikan yang tidak terkontrol dapat digunakan sebagai penyamaran untuk kegiatan-kegiatan ilegal lainnya seperti perdagangan narkoba, penyelundupan manusia, atau bahkan terorisme. Oleh karena itu, isu illegal fishing di Kepulauan Riau tidak hanya menjadi masalah lingkungan dan ekonomi, tetapi juga menyangkut keamanan nasional.

Kebijakan publik adalah respons pemerintah terhadap krisis atau masalah publik, sebagaimana didefinisikan oleh beberapa ahli, termasuk Chandler dan Plano seperti yang dikutip oleh Tangkilisan (2003: 1). Definisi tersebut menekankan pada strategi pemanfaatan sumber daya untuk memecahkan masalah publik atau memenuhi kepentingan masyarakat. Dalam konteks ini, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai hasil pemekaran dari Provinsi Riau, menghadapi berbagai tantangan dan krisis yang memerlukan kebijakan publik yang bijaksana dan strategis. Letak

geografis yang strategis antara Laut Cina Selatan dan Selat Malaka membuat provinsi ini memiliki karakteristik khusus yang memengaruhi kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah provinsi.

Provinsi Kepulauan Riau terletak di antara 0°29' LS dan 04°40' LU serta antara 103°22' BT sampai dengan 109°4' BT, berbatasan dengan negara-negara seperti Vietnam dan Kamboja di utara, Malaysia, Brunei, dan Provinsi Kalimantan Barat di timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Jambi di selatan, serta Singapura, Malaysia, dan Provinsi Riau di barat. Letak geografis yang strategis, terutama di antara Laut Cina Selatan dan Selat Malaka, memberikan provinsi ini keunggulan dalam hal konektivitas dan akses ke jalur perdagangan internasional.

Kondisi perairan di sekitar provinsi ini juga menjadi faktor penting dalam menentukan kebijakan publik. Bagian barat provinsi memiliki perairan dangkal dengan kedalaman sekitar 40 meter, terutama dengan dasar lumpur berpasir dan berkarang. Salinitas perairan berkisar antara 28‰ di perairan pantai yang banyak dihuni penduduk dan 35‰ di perairan lepas pantai. Di bagian Timur, perairan lebih dalam, melebihi 80 meter, dengan dasar pasir campur pasir lumpur dan karang. Kondisi ini menunjukkan keberagaman karakteristik geografis di Provinsi Kepulauan Riau, yang secara langsung mempengaruhi strategi kebijakan pemerintah.

Provinsi Kepulauan Riau, meskipun memiliki keistimewaan karakteristik geografis, juga menghadapi sejumlah tantangan dan krisis yang memerlukan tindakan kebijakan publik yang efektif. Salah satu tantangan utama adalah illegal fishing di perairan provinsi ini. Letaknya yang strategis membuat perairan di sekitarnya menjadi sasaran empuk bagi praktik illegal fishing yang merusak ekosistem laut dan merugikan nelayan lokal. Oleh karena itu, pemerintah provinsi perlu merespon secara cepat dan strategis untuk melindungi sumber daya perikanan dan kehidupan ekonomi masyarakat pesisir.

Selain itu, keberlanjutan pembangunan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan menjadi fokus kebijakan publik. Dalam kerangka Chandler dan Plano, pemanfaatan strategis terhadap sumber daya harus dilakukan untuk memastikan bahwa pembangunan berlangsung secara inklusif dan memberdayakan kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Oleh karena itu, kebijakan publik di Provinsi Kepulauan Riau juga harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kesempatan partisipasi yang lebih besar dalam pembangunan. Studi kasus terhadap kebijakan publik di Provinsi Kepulauan Riau harus mencakup evaluasi dampak kebijakan tersebut. Analisis ini mencakup perubahan dalam aktivitas illegal fishing, keberhasilan patroli maritim, dan penangkapan kapal ilegal. Selain itu, evaluasi ekonomi melibatkan dampak kebijakan terhadap pendapatan nelayan, diversifikasi ekonomi, dan partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan. Tantangan yang dihadapi oleh kebijakan publik Provinsi Kepulauan Riau juga harus diidentifikasi. Faktor-faktor seperti keterbatasan sumber daya, koordinasi lintas sektoral, dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan perikanan menjadi aspek-aspek krusial yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan. Oleh karena itu, evaluasi ini juga harus menyelidiki sejauh mana tantangan ini telah diatasi atau memerlukan strategi tambahan.

METODE

Metode penelitian yang dipilih untuk menginvestigasi kebijakan publik Provinsi Kepulauan Riau dalam mengatasi illegal fishing memerlukan pendekatan yang holistik dan dapat memberikan pemahaman yang mendalam terhadap dinamika kebijakan serta dampaknya. Yaitu dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif akan digunakan untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang faktor-faktor kontekstual yang mempengaruhi pembuatan kebijakan, implementasi, dan dampaknya. Analisis isi dari dokumen kebijakan, laporan resmi, dan berita lokal juga akan dilakukan untuk melacak perubahan dalam naratif publik dan evaluasi resmi kebijakan.

Pendekatan studi kasus mungkin juga menjadi bagian dari metode kualitatif, memungkinkan peneliti untuk memeriksa kebijakan dan implementasinya di lapangan dengan

detail yang lebih besar. Dengan mendalami studi kasus terkait penegakan hukum, dampak ekonomi, dan peran masyarakat dalam program pemberdayaan, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang efektivitas kebijakan dan tantangan yang dihadapi. Metode kuantitatif akan digunakan untuk memberikan dukungan empiris terhadap temuan kualitatif dan mengukur dampak kebijakan secara lebih obyektif. Survei masyarakat dapat dilakukan untuk mengukur tingkat kesadaran, persepsi, dan partisipasi dalam program pemberdayaan yang diimplementasikan oleh pemerintah. Data statistik tentang penangkapan ilegal, jumlah kapal yang ditangkap, dan penurunan aktivitas illegal fishing dapat dianalisis untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan penegakan hukum. Analisis regresi statistik juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel-variabel tertentu, seperti tingkat sanksi hukum atau tingkat partisipasi masyarakat, dengan tingkat illegal fishing.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Provinsi Kepulauan Riau, dengan letak geografisnya yang strategis di antara Selat Malaka dan Laut Cina Selatan, memiliki kekayaan sumber daya alam laut yang melimpah. Namun, tantangan besar muncul dengan adanya seringnya negara-negara asing terlibat dalam praktik illegal fishing dan eksploitasi kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) laut di wilayah ini. Artikel ini akan membahas fenomena seringnya negara luar mengambil kekayaan SDA di laut Kepulauan Riau, menganalisis faktor-faktor yang mendorong praktik tersebut, dampaknya terhadap lingkungan dan ekonomi lokal, serta upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini. Provinsi Kepulauan Riau memiliki perairan yang kaya akan keanekaragaman hayati laut. Laut di sekitar pulau-pulau ini menjadi habitat bagi berbagai jenis ikan, kepiting, kerang, dan biota laut lainnya. Selain itu, terumbu karang yang indah dan ekosistem mangrove yang penting juga terdapat di wilayah ini. Kekayaan ini tidak hanya memberikan mata pencaharian bagi masyarakat lokal yang mayoritas adalah nelayan, tetapi juga memiliki potensi besar dalam mendukung sektor pariwisata.

Negara-negara luar tertarik dengan Kepulauan Riau karena melimpahnya sumber daya alam laut. Hasil tangkapan ikan yang beragam dan jumlahnya yang besar menjadi daya tarik utama bagi kapal-kapal nelayan ilegal. Kelemahan dalam sistem pengawasan dan patroli maritim di wilayah tersebut menjadi celah bagi kapal-kapal asing untuk beroperasi tanpa terdeteksi. Kurangnya kapasitas dalam pengawasan menyebabkan banyak pelanggaran yang tidak terungkap. Dalam beberapa kasus, kemiskinan dan ketidakpastian ekonomi di negara-negara tertentu dapat mendorong nelayan ilegal untuk mencari kesempatan di perairan Kepulauan Riau. Upah yang rendah dan sulitnya mendapatkan pekerjaan di negara asal dapat memicu praktik illegal fishing. Tidak adanya kerjasama internasional yang kuat dalam mengatasi illegal fishing dapat membuat negara-negara asing merasa lebih leluasa untuk beroperasi di perairan Kepulauan Riau tanpa takut akan konsekuensi yang signifikan.

Praktik illegal fishing dapat menyebabkan kerusakan ekosistem laut, terutama terumbu karang dan habitat biota laut. Penggunaan alat tangkap yang merusak, seperti trawl dan bom ikan, dapat mengancam keberlanjutan ekosistem. Eksploitasi berlebihan oleh kapal-kapal ilegal dapat menyebabkan penurunan populasi ikan yang signifikan. Hal ini dapat mengancam mata pencaharian nelayan lokal dan merusak rantai makanan di ekosistem laut. Nelayan lokal yang berusaha menjalankan usaha perikanan secara legal dapat mengalami kerugian ekonomi akibat persaingan yang tidak sehat dengan kapal-kapal ilegal. Penurunan hasil tangkapan dan harga ikan dapat mengancam keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir. Praktik illegal fishing juga dapat menjadi ancaman terhadap keamanan nasional. Kapal-kapal ilegal dapat digunakan sebagai sarana untuk kegiatan ilegal lainnya, seperti penyelundupan narkoba atau perdagangan manusia.

Kebijakan Yang dilakukan Pemerintah dalam menanggulangi Illegal Fishing

1. Penguatan Undang-Undang

Dalam rangka menjaga keberlanjutan kekayaan ikan dan sumber daya laut lainnya, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menetapkan ketentuan-ketentuan yang tegas. Salah satu aspek yang menjadi fokus adalah kebijakan pengelolaan sumber daya ikan. Menteri perikanan ditugaskan untuk menetapkan beberapa hal yang berkaitan dengan jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan, jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan, persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan, sistem pemantauan kapal perikanan, ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap, jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah negara Republik Indonesia, serta jenis ikan yang dilindungi (Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009).

Beberapa aspek yang menjadi fokus Pasal 7 ayat 1 dan 2 tersebut, seperti jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan, serta jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan, merupakan hal yang dianggap sangat penting dalam konteks keberlanjutan sumber daya ikan. Keberlanjutan tersebut menjadi target utama dan juga merupakan praktik yang kerap dilakukan oleh pelaku illegal fishing yang sulit untuk diatasi. Oleh karena itu, Menteri Perikanan telah mengambil langkah tegas dengan menerapkan aturan-aturan yang jelas dan tanpa ragu-ragu.

Selain Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Menteri Perikanan juga mempertegas ketentuan-ketentuan tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pukat Harimau (Trawl). Hal ini dilakukan sebagai respons terhadap kebutuhan untuk lebih mengatur dan mengawasi penggunaan alat penangkapan ikan tertentu, dalam hal ini Pukat Harimau. Penyempurnaan regulasi ini membuktikan komitmen pemerintah dalam melindungi sumber daya ikan dan menekan praktik illegal fishing.

Ketegasan Menteri Perikanan dalam menerapkan aturan-aturan tersebut juga didukung oleh fakta empirik yang menunjukkan bahwa regulasi-regulasi tersebut memang memiliki urgensi dan relevansi yang tinggi. Implementasi aturan-aturan tersebut menjadi petunjuk konkret yang dapat dieksekusi oleh petugas lapangan dalam menangani kasus-kasus illegal fishing. Langkah-langkah ini membantu memberikan landasan hukum yang kuat untuk menindak pelanggaran peraturan perikanan.

Dengan adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pukat Harimau, Menteri Perikanan memberikan perhatian khusus pada jenis alat penangkapan ikan tertentu yang dianggap memiliki dampak negatif terhadap ekosistem laut dan keberlanjutan sumber daya ikan. Pukat Harimau dikenal sebagai salah satu alat penangkapan ikan yang kontroversial karena dapat merusak habitat laut dan menyebabkan penangkapan ikan yang tidak selektif.

Dengan demikian, langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah, baik melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 maupun Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015, mencerminkan kebijakan yang bertujuan untuk mengelola sumber daya ikan dengan bijaksana. Ketegasan dalam menetapkan regulasi-regulasi tersebut menjadi langkah kritis dalam melindungi kekayaan ikan dan sumber daya laut lainnya, serta dalam mendukung kesejahteraan dan kedaulatan negara di tengah tantangan ilegal fishing yang persisten.

2. Penguatan Patroli Laut

Salah satu langkah utama yang diambil oleh pemerintah Indonesia adalah penguatan patroli maritim di perairan Kepulauan Riau. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di laut. Pemerintah telah meningkatkan jumlah dan kualitas kapal patroli yang bertugas di wilayah ini. Peningkatan ini mencakup investasi dalam kapal-kapal patroli berkecepatan tinggi yang dilengkapi dengan teknologi mutakhir, seperti

radar dan sistem pemantauan satelit. Dengan demikian, pemerintah dapat lebih efektif mendeteksi dan menindak kapal-kapal ilegal yang beroperasi di perairan Kepulauan Riau

3. Penggunaan Teknologi baru yang dapat bersaing dengan negara lain

Sistem pemantauan satelit memungkinkan pemerintah untuk mendapatkan gambaran luas dan akurat tentang pergerakan kapal di perairan Indonesia. Data yang diperoleh dari satelit dapat memberikan informasi tentang lokasi, arah, dan kecepatan kapal, sehingga memudahkan identifikasi kapal-kapal yang mungkin terlibat dalam praktik ilegal fishing. Pemerintah dapat secara proaktif merespons aktivitas mencurigakan dan mengambil tindakan penegakan hukum yang tepat waktu. Selanjutnya, penggunaan radar juga menjadi bagian integral dari strategi pengawasan maritim. Radar memungkinkan deteksi objek di permukaan laut, termasuk kapal-kapal yang berusaha menghindari deteksi. Dengan kombinasi sistem radar dan satelit, pemerintah dapat menciptakan jaringan pemantauan yang lebih komprehensif, mencakup area-area yang sulit dijangkau secara langsung oleh kapal patroli.

Penerapan teknologi kapal tanpa awak (drone) menjadi langkah progresif dalam peningkatan pemantauan. Drone dapat dioperasikan untuk melakukan pemantauan intensif di area-area yang sulit dijangkau atau berisiko tinggi. Kelebihan drone termasuk fleksibilitas, kemampuan terbang rendah, dan kemampuan untuk mengumpulkan data secara real-time. Dengan menggunakan drone, pemerintah dapat lebih responsif terhadap perubahan kondisi di laut dan dapat menanggapi secara cepat ketika ada indikasi aktivitas ilegal. Pemanfaatan teknologi ini secara signifikan meningkatkan kapasitas pengawasan pemerintah dalam melawan ilegal fishing. Data yang diperoleh melalui teknologi canggih dapat diintegrasikan ke dalam sistem analisis yang canggih, memungkinkan identifikasi pola perilaku ilegal yang lebih kompleks. Selain itu, teknologi ini juga membantu dalam memprioritaskan area-area yang memerlukan tindakan penegakan hukum lebih intensif.

Keberhasilan pemanfaatan teknologi canggih dalam upaya penegakan hukum terkait ilegal fishing juga memberikan dampak positif terhadap efisiensi penggunaan sumber daya. Dengan kemampuan untuk mendeteksi secara dini dan merespons lebih cepat, pemerintah dapat mengoptimalkan penggunaan kapal patroli dan sumber daya lainnya. Hal ini tidak hanya meningkatkan efektivitas tetapi juga memastikan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dalam menjaga keamanan dan keberlanjutan perairan. Dengan pemanfaatan teknologi canggih yang terus berkembang, pemerintah Indonesia semakin siap menghadapi tantangan ilegal fishing. Kombinasi antara kehadiran patroli maritim dan teknologi canggih menciptakan strategi pengawasan yang holistik dan adaptif. Penerapan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan mengurangi dampak negatif dari aktivitas ilegal fishing di perairan Indonesia.

KESIMPULAN

Upaya pemerintah Indonesia dalam menanggulangi praktik ilegal fishing di perairan Kepulauan Riau melalui penguatan patroli maritim dan pemanfaatan teknologi canggih. Upaya ini menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan dan kekayaan laut lainnya, sambil memastikan kesejahteraan dan kedaulatan negara. Penguatan patroli maritim menciptakan kehadiran yang lebih nyata dan efektif di perairan, memperkuat penegakan hukum, dan memberikan efek jera terhadap para pelaku ilegal fishing. Peningkatan jumlah dan kualitas kapal patroli, serta peningkatan kegiatan patroli, menjadi langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pengawasan dan mengurangi peluang bagi kapal-kapal ilegal untuk beroperasi tanpa terdeteksi. Dengan demikian, pemerintah menciptakan fondasi yang kuat untuk mengatasi tantangan ilegal fishing.

Selain itu, pemanfaatan teknologi canggih, seperti sistem pemantauan satelit, radar, dan drone, menjadi landasan penting dalam peningkatan kapasitas pengawasan pemerintah.

Teknologi ini memungkinkan pemantauan secara real-time, identifikasi pola perilaku mencurigakan, dan respons cepat terhadap aktivitas ilegal fishing. Integrasi data dari berbagai sumber memberikan gambaran yang lebih komprehensif, memungkinkan pemerintah untuk mengambil keputusan yang lebih akurat dan efektif. Selain itu, pemanfaatan teknologi ini juga membantu pemerintah untuk lebih efisien dalam alokasi sumber daya, memastikan optimalisasi penggunaan kapal patroli dan sumber daya lainnya. Ilegal fishing tetapi juga mengarah pada perubahan paradigma dalam pengelolaan perikanan. Integrasi teknologi dalam pengawasan laut menciptakan sistem yang adaptif dan responsif terhadap perubahan kondisi di perairan. Pemerintah juga menunjukkan kebijakan yang progresif dengan mengeluarkan peraturan-peraturan yang sesuai, seperti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pukat Harimau, yang mengakomodasi kebutuhan untuk mengatur dan mengawasi alat penangkapan ikan tertentu.

Keberhasilan strategi ini tidak hanya bergantung pada kebijakan dan teknologi semata, melainkan juga pada peran aktif sumber daya manusia. Pelatihan dan peningkatan keterampilan personel terkait dengan analisis data yang canggih menjadi aspek penting dalam mengoptimalkan manfaat teknologi tersebut. Kolaborasi antara teknologi dan sumber daya manusia menciptakan sinergi yang diperlukan untuk kesuksesan operasional dan pengawasan laut yang efektif. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk melindungi keberlanjutan sumber daya ikan dan lingkungan laut. Penguatan patroli maritim dan pemanfaatan teknologi canggih bukan hanya merupakan langkah-langkah taktis, tetapi juga merepresentasikan visi jangka panjang dalam pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

- Alamsyah, Bobby Bella. 2017. "Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menanggulangi Illegal Fishing Di Kepulauan Riau 2010-2015." *eJournal Ilmu Hubungan Internasional* 5(4): 1381-96.
- Aprizal, Fernando, and Siti Muslimah. 2019. "Unregulated Fishing Yang Dilakukan Terhadap Kapal Km Bd 95599 Ts Di Laut Natuna Sesuai Dengan Hukum Internasional." *belli Ac Pacis* 5(2): 87-92.
- Cintani, Annisa Fita, Budi Santoso, and Irma Cahyaningtyas. 2021. "Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Pencurian Ikan Terhadap Kapal-Kapal Asing Di Wilayah Perairan Indonesia." *Notarius* 14(2): 708-22.
<https://app.dimensions.ai/details/publication/pub.1151461207%0Ahttps://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/43722/20762>.
- Endri. 2015. "Penanggulangan Kejahatan Illegal Fishing Di Kepulauan Riau." *Jurnal Ilmu Hukum* 5(2): 18.
- MUHAMAD, SIMELA VICTOR. 2012. "Illegal Fishing Di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan." *Jurnal Illegal Fishing* 3(Illegal Fishing Di Perairan Indonesia): 59-86.
- Ramadhanty, N R, E Legowo, and M A Madjid. 2021. "Sinergi Instansi Penegak Hukum Terhadap Kasus Illegal Transshipment Di Perairan Nipa Transit Anchorage Area (Ntaa) Batam Guna" *Keamanan Maritim* 7: 94-104.
<https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/KM/article/view/1017%0Ahttps://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/KM/article/download/1017/856>.
- Yansen Mandacan, Faizal Aco. 2021. "KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGGULANGI ILLEGAL FISHING PADA TAHUN 2014-2015." *Jurnal Enersia Publik No. 1 Hal 330-341* 5(1): 1-14.

Undang-Undang

"Peraturan Menti Kelautan Dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pukat Harimau."
"UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN."